

Suatu Tinjauan Atas Kehidupan Politik di Indonesia 1983

M. DJADIJONO*

Menyongsong dimulainya tahun 1984, kiranya ada baiknya dibuat suatu catatan mengenai apa yang telah terjadi dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia selama tahun 1983. Pembuatan catatan semacam itu paling kurang mengandung tiga kepentingan. *Pertama*, sebagai alat bantu bagi daya ingat kita mengenai apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang telah diperbuat oleh bangsa Indonesia sendiri dalam tahun 1983 tersebut. *Kedua*, sebagai bahan untuk mawas diri dalam rangka mencari alternatif yang lebih baik untuk tahun berikutnya. *Ketiga*, sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kehidupan perpolitikan di Indonesia selama setahun yang lalu, baik berkenaan dengan hal-hal yang positif maupun mengenai kecenderungan-kecenderungan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya catatan-catatan seperti itu, kiranya dapat diharapkan bahwa tindakan-tindakan politik yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dapat diusahakan secara lebih baik.

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN TAHUN 1983

Memasuki tahun 1983 yang lalu, bangsa Indonesia tetap bertekad untuk melaksanakan pembangunan secara terus-menerus. Dalam rangka itu ternyata bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup rumit, baik karena pengaruh perkembangan yang terjadi dalam percaturan politik global dan regional maupun pengaruh dari usaha-usaha bangsa Indonesia sendiri untuk terus mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap apa yang telah dicapai selama ini.

Dalam skala internasional maupun regional, rumitnya permasalahan yang mau tidak mau mempengaruhi kehidupan negara dan bangsa Indonesia itu an-

*Staf CSIS.

tara lain dapat dilihat dari penegasan-penegasan Presiden Soeharto seperti berikut ini: (1) keamanan dan ketenteraman dunia terasa tetap tidak terjamin. Perlombaan senjata antara kekuatan-kekuatan besar dunia belum ada tanda-tanda mereda, bahkan sebaliknya diam-diam terus berlangsung. Pergolakan dan ketegangan di berbagai kawasan dunia masih berlangsung terus; (2) perkembangan dunia yang terjadi tahun-tahun terakhir ini dan mungkin masih akan berlangsung terus dalam tahun-tahun mendatang tidak selamanya sejalan dengan kepentingan pembangunan kita; (3) dunia yang penuh dengan gejolak dan kerawanan itu makin mencemaskan lagi karena resesi ekonomi dunia yang tidak kunjung reda, dan bahkan sulit diramalkan kapan akan berakhir; (4) kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan dunia seperti itu jelas mempengaruhi gerak majunya pembangunan bangsa Indonesia;¹ (5) apabila tepat setahun yang lalu saya mengatakan bahwa tahun 1982 bukanlah tahun yang terlalu cerah dan harus kita masuki dengan keprihatinan dan kewaspadaan, maka semangat keprihatinan dan kewaspadaan serta kerja keras itu harus kita tingkatkan dalam tahun 1983.²

Sementara itu, dalam skala nasional kehidupan perpolitikan kita secara garis besarnya dapat dikatakan diwarnai oleh berbagai permasalahan politis strategis, politis ideologis, politis organisatoris, politis kemasyarakatan maupun politis ekonomis.

Dalam kehidupan politik yang bersifat strategis, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan mengenai pentingnya memperkuat kerangka landasan pembangunan nasional dalam rangka "take-off" atau tinggal landas menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara itu, dalam kehidupan politik yang bersifat ideologis, sebagai akibat timbulnya berbagai peristiwa politik yang kurang baik selama pelaksanaan kampanye Pemilu 1982, bangsa Indonesia dihadapkan pada tuntutan mengenai pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Dalam kehidupan politik organisatoris, khususnya organisasi-organisasi kekuatan sosial politik, sebagai akibat terjadinya pengalaman-pengalaman yang kurang menguntungkan selama pelaksanaan Pemilu 1982 yang lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada perlunya konsolidasi kekuatan-kekuatan sosial politik. Sementara itu, berkenaan dengan kehidupan politik kemasyarakatan, sesuai dengan amanat GBHN (1978), bangsa Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemantapan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sedangkan dalam ke-

¹Lihat *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Tahun 1983, Triwulan ke I, hal. 9-10.

²Lihat *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Tahun 1982, Triwulan ke IV, hal. 650.

hidupan politis ekonomis, bangsa Indonesia dihadapkan pada kesulitan-kesulitan perekonomian, baik karena resesi ekonomi yang melanda dunia maupun karena "terbatasnya" sumber daya ekonomi. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas, berikut ini dipaparkan berbagai peristiwa maupun pemikiran serta tindakan-tindakan politik yang terjadi dalam tahun 1983.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS STRATEGIS

Memasuki awal tahun 1983, kehidupan perpolitikan di Indonesia diwarnai oleh pemikiran-pemikiran dan peristiwa yang bersifat politis strategis, misalnya munculnya berbagai saran kepada MPR mengenai ketetapan-ketetapan yang perlu dibuat. Pemikiran-pemikiran politis strategis itu mencapai puncaknya dalam Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1983. Berbagai pemikiran yang berkembang di sekitar Sidang Umum MPR itu dapat dikatakan bersifat politis strategis karena apa pun yang diputuskan olehnya akan menentukan kehidupan dan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia untuk masa lima tahun kemudian dan mengikat semua pihak, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan adanya sementara kalangan yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil.

Sebagaimana diketahui, Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1983 yang lalu itu telah berlangsung secara sangat lancar, tertib dan aman. Sidang Umum MPR itu telah menghasilkan 8 buah ketetapan, yaitu Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib; Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN; Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum; Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum; Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR dikaitkan dengan Pemberian Penghargaan kepada Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Bapak Pembangunan; Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1983-1988; Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris MPR Dalam Rangka Penuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional; Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Jenderal (Purn.) Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.¹

Putusan-putusan MPR tersebut merupakan perumusan strategi pembangunan bangsa dan negara untuk masa lima tahun mendatang. Dengan telah

¹*Ketetapan MPR RI Tahun 1983 dan Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR-RI tanggal 1 Maret 1983, Jakarta, BP-7 Pusat, 1983.*

dihasilkannya putusan-putusan MPR itu jalannya kehidupan bangsa dan negara untuk masa lima tahun mendatang telah diperjelas. Persoalan yang tinggal sekarang adalah bagaimana melaksanakan strategi pembangunan yang telah diputuskan itu. Berkenaan dengan pelaksanaan Tap-tap MPR tersebut telah muncul berbagai pemikiran. Di antara pemikiran-pemikiran itu, yang menonjol adalah mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, terutama pelaksanaan ketentuan bahwa: "... demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas," yang kemudian populer dengan sebutan asas tunggal Pancasila. Pemikiran-pemikiran tersebut secara dominan mewarnai kehidupan perpolitikan Indonesia dalam tahun 1983.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS IDEOLOGIS

Tahun 1983 yang lalu, sebagaimana diketahui bersama, juga diwarnai oleh peristiwa maupun pemikiran yang bersifat politis ideologis. Berbagai pemikiran dan peristiwa yang bersifat politis ideologis itu muncul secara merata dalam berbagai media cetak. Peristiwa-peristiwa dan pemikiran politis ideologis itu mulai setelah penetapan MPR bahwa setiap kekuatan sosial politik di Indonesia harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan penegasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut tampak dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN Bab IV.D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Bagian Umum butir 3 dan Bab IV.D. Bagian Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri No. 1.h.; serta tercantum dalam Bab V (Penutup).

Setelah adanya ketentuan-ketentuan GBHN tersebut, berbagai reaksi dan tanggapan mulai bermunculan, baik berupa pemikiran maupun terjadinya aktivitas-aktivitas organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan. Berkenaan dengan pemikiran-pemikiran ideologis itu antara lain ada pendapat yang mengatakan bahwa asas tunggal Pancasila tidak berlaku bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan.¹ Di samping itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan asas tunggal Pancasila itu berlaku bagi segenap elemen kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.

Di antara aktivitas-aktivitas organisasi sosial politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan dapat disebutkan: (1) Kongres HMI di Medan bulan

¹Lihat Tajuk *Pelita*, 9 Juni 1983; artikel dalam *Kompas*, 27 Juni 1983; wawancara dalam *Kompas*, 1 Juli 1983.

Mei 1983 yang mengambil putusan: tetap menggunakan asas Islam sebagai asas organisasi; (2) Mukernas GMKI di Surabaya tanggal 26 Juni - 1 Juli 1983 yang memutuskan bahwa penerapan asas tunggal Pancasila masih perlu pengkajian; (3) Munas ke III Golkar di Jakarta tanggal 20-25 Oktober 1983 yang memutuskan menerima asas tunggal Pancasila; (4) pernyataan Ketua Umum DPP PPP Dr. H.J. Naro bahwa PPP menerima asas tunggal Pancasila;¹ (5) pernyataan Ketua Umum DPP PDI Prof. Dr. Soenawar Soekowati bahwa PDI menerima asas tunggal Pancasila;² (6) Kongres GMNI di Lembang Bandung tanggal 19-21 Nopember 1983 yang menerima asas Pancasila sebagai asas organisasi (disertai dengan interpretasi atas Pancasila); (7) Munas Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 18-21 Desember 1983 menerima Pancasila sebagai asas organisasi (disertai dengan interpretasi terhadap Pancasila).³

Di samping itu ada pula aktivitas-aktivitas organisasi yang "ditunda," misalnya Muktamar Muhammadiyah. Penundaan dilakukan sambil menunggu keluarnya UU Keormasan yang mengatur penerapan asas tunggal Pancasila bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan.⁴ Sedangkan siaran pers Pengurus Pusat PMKRI tanggal 21 Nopember 1983 menegaskan "Pancasila memang merupakan asas negara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun hal itu bukan berarti bahwa Pancasila juga harus diberlakukan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan. PMKRI berpendapat bahwa penerapan asas tunggal Pancasila merupakan monolitisasi dan bertentangan dengan demokrasi."⁵ Dari semuanya itu tampak secara jelas bahwa penetapan asas tunggal Pancasila tersebut telah memperoleh tanggapan pro maupun kontra. Tanggapan-tanggapan mengenai penerapan asas tunggal itu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok yang pertama menolak secara apriori; yang kedua menerima dengan ragu-ragu; dan yang ketiga menerima dengan penuh kesadaran. Adanya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian tersendiri di dalam memasuki tahun 1984.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS ORGANISATORIS

Sebagai konsekuensi logis dari putusan MPR yang menetapkan bahwa setiap kekuatan sosial politik harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya

¹Sambutan Ketua Umum DPP PPP pada Munas III Golkar.

²Sambutan Ketua Umum DPP PDI dalam Munas III Golkar.

³Lihat *Pelita*, 22 Desember 1983.

⁴Lihat *Merdeka*, 11 Nopember 1983.

⁵*Kompas*, 23 Nopember 1983.

asas dan bertepatan dengan ketentuan Anggaran Dasar berbagai organisasi kekuatan sosial politik yang ada, maka berbagai aktivitas organisasi-organisasi kekuatan sosial politik ikut mewarnai kehidupan perpolitikan di Indonesia dalam tahun 1983. Dalam bulan Oktober 1983, suasana politik organisatoris disemarakkan dengan terjadinya Musyawarah Nasional ke III Golongan Karya. Selanjutnya dalam bulan Nopember suasana perpolitikan dihangatkan oleh adanya rencana Muktamar PPP. Bersamaan dengan adanya rencana Muktamar PPP itu, suasana lebih dihangatkan lagi oleh adanya keinginan dari sementara anggota PPP agar Muktamar memutuskan untuk meminta kesediaan Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi "Pembina Utama" PPP.¹ Ide semacam ini sebagaimana diketahui telah memperoleh tanggapan positif dan dukungan dari sementara kalangan dalam PDI.²

Adanya usul dari sementara kalangan dalam PPP dan PDI untuk meminta Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi Pembina Utama partai politik itu sempat mengundang berbagai komentar dan tanggapan dari berbagai pihak. Dari sekian banyak tanggapan dan komentar mengenai usul sementara kalangan untuk meminta kesediaan Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi Pembina Utama PPP itu, yang sangat menarik adalah Tajuk Rencana harian *Berita Buana*, *Sinar Harapan* dan *Suara Karya*, dan tanggapan dari Ketua DPR/MPR serta staf pengajar FIS-UI.

Menanggapi usul sementara kalangan dalam PPP, Tajuk Rencana harian *Berita Buana* tanggal 17 Nopember 1983 antara lain menyatakan hal-hal berikut: (1) Jenderal (Purn.) Soeharto dengan Golkar tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang sangat erat merupakan produk sejarah perjuangan Orde Baru sejak lahirnya dan berkaitan dengan sejarah perkembangan kehidupan politik jaman Orde Baru; (2) dengan tumbangya PKI dan kekuasaan Bung Karno, pihak-pihak tertentu hendak memanfaatkan situasi untuk berkuasa. Hal itu tercermin dari sikapnya tidak mau mengutuk PKI yang mendalangi G-30-S. Mereka menganggap bahwa tumbangya PKI dan kekuasaan Bung Karno seolah-olah sekedar turunnya kekuasaan suatu partai politik dan tokoh politik untuk digantikan oleh partai dan tokoh saingannya.

Dalam pada itu, Tajuk Rencana harian *Sinar Harapan* tanggal 16 Nopember 1983 menyatakan bahwa: (1) Bung Karno pernah mencoba untuk mengkombinasikan posisi sebagai lambang persatuan dan kesatuan nasional dengan fungsi Bung Karno sebagai pemimpin pemerintahan. Hal itu dilakukannya dengan cara menghimpun semua kekuatan politik di sekitar meja laksana anggota-anggota satu keluarga. Namun seperti kita ketahui, sistem

¹Lihat *Kompas*, 14 Nopember 1983 dan *Pelita*, 16 Nopember 1983.

²Lihat *Suara Karya*, 15 Nopember 1983.

politik yang dibangun selama Demokrasi Terpimpin itu tidak begitu berhasil; (2) dalam Orde Baru kita mengembangkan pendekatan yang baru untuk mengkombinasikan pembinaan persatuan bangsa sebaik-baiknya dengan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Usaha kita itu masih berjalan terus sampai sekarang. Itulah yang kita sebut dengan pengembangan Demokrasi Pancasila.

Sedangkan Tajuk Rencana harian *Suara Karya* tanggal 18 Nopember 1983 antara lain menyatakan bahwa: "keinginan PPP menjadikan Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai 'Pembina Utama' PPP itu mengandung unsur kultus individu. Berbeda dengan posisi dalam Golkar: Ketua Dewan Pembina menunjukkan adanya kolektivitas. Dengan demikian, posisi Jenderal (Purn.) Soeharto dalam Golkar tidak mengandung unsur-unsur kultus individu."

Ketua DPR/MPR Amirmachmud, menanggapi usul sementara kalangan dalam PPP itu berpendapat: "Sejak Orde Baru, Pak Harto ikut secara langsung membangun dan membesarkan Golkar. Sebaliknya hal serupa tidak dilakukannya secara langsung kepada Parpol. Dengan demikian Pak Harto memang orang Golkar. Oleh karenanya adalah logis bila Pak Harto menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Adanya keinginan dari kalangan Parpol untuk menjadikan Pak Harto sebagai Pembina Utama Parpol hanya akan menyudutkan dan membahayakan Pak Harto. Bahkan hal itu bisa merusak mekanisme dan prosedur Demokrasi Pancasila, kecuali kalau ada maksud-maksud lain."¹ Hampir senada dengan Ketua DPR/MPR, staf pengajar FIS-UI Dr. Nazaruddin Sjamsuddin berpendapat bahwa: "Merupakan suatu keanehan bila Pak Harto juga diminta menjadi Pembina Utama Parpol, sebab Pak Harto memang orang Golkar. Apalagi bila diingat bahwa Parpol tidak masuk dalam Kabinet. Untuk menegakkan istilah Pembina Utama perlu kehati-hatian."²

Komentar-komentar tersebut di atas sangat menarik untuk diamati dan direnungkan, terutama dalam rangka kewaspadaan nasional. Hal itu disebabkan karena pernyataan-pernyataan/tanggapan tersebut di atas memang mengandung hal-hal yang pada pokoknya mengajak tetap waspada. Perlunya kewaspadaan nasional itu kiranya lebih relevan lagi bila kita ingat bahwa ketika akan memasuki tahun 1983 yang lalu, Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya kewaspadaan. Di samping itu, Presiden Soeharto pernah menegaskan: "Kita juga harus berhati-hati dan waspada dalam memberi isi ke dalam praktek kehidupan politik dan ketatanegaraan. ... Kita juga sedang berusaha agar identitas kelompok tidak merusak nilai-nilai dasar yang men-

¹*Suara Karya*, 17 Nopember 1983.

²*Ibid.*

jadi kekuatan utama bangsa kita.”¹ Pada kesempatan lain, Presiden Soeharto menegaskan: ”... saya perlu mengingatkan kita semua, agar kita tidak lengah dan merasa puas diri. Bahaya terhadap Pancasila tetap masih ada dan dapat datang dari luar maupun dari dalam.”²

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS KEMASYARAKATAN

Dalam bidang politik kemasyarakatan, tahun 1983 suasana disemarakkan oleh berbagai peristiwa kongres organisasi-organisasi kemasyarakatan. Di samping itu juga adanya Mukernas maupun Rapat DPP diperluas. Peristiwa-peristiwa itu misalnya adalah: (1) Kongres HMI di Medan bulan Mei 1983; (2) Mukernas GMKI di Surabaya tanggal 29 Juni - 1 Juli 1983; (3) Kongres GMNI di Lembang, Bandung tanggal 19-21 Nopember 1983; (4) Sidang DPP GAMKI diperluas di Jakarta tanggal 19 Nopember 1983. Kecuali itu PMKRI mengadakan kongres dalam bulan Desember 1983.

Sementara itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan lain yang bernafaskan keagamaan juga mengadakan aktivitas-aktivitasnya, misalnya Munas Alim Ulama NU, Sidang Tahunan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI).

Yang sangat menarik dari berbagai aktivitas organisasi-organisasi kemasyarakatan itu menyangkut masalah penerimaan mereka terhadap ketentuan MPR mengenai asas tunggal Pancasila. Di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat variasi pandangan dan sikap terhadap pelaksanaan asas tunggal Pancasila. Variasi tanggapan dan sikap mengenai asas tunggal Pancasila tampaknya masih akan berlangsung terus sampai tahun 1984. Inilah kiranya beban tugas yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 1984 ini.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS EKONOMIS

Sebagaimana diketahui, memasuki tahun 1983 yang lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada kesulitan-kesulitan perekonomian sebagai akibat terjadinya

¹Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 16 Agustus 1980 dalam *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1980, Triwulan ke III, hal. 298-299.

²Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 15 Agustus 1981 dalam *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981, Triwulan ke III, hal. 433.

resesi ekonomi dunia. Usaha-usaha mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut ikut pula mewarnai suasana kehidupan politik kita dalam tahun 1983 itu. Dalam tahun 1983 itu, suasana kehidupan politis ekonomis kita ditandai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter sebagai berikut: (1) pada tanggal 7 Januari 1983, pemerintah menaikkan harga BBM; (2) tanggal 30 Maret 1983, pemerintah melakukan devaluasi nilai Rupiah terhadap Dollar AS; (3) pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengambil kebijakan untuk menghapuskan pagu kredit bank. Di samping itu pemerintah juga menaikkan suku bunga Tabanas; (4) dalam bulan Nopember, pemerintah mengajukan berbagai RUU Perpajakan dalam rangka mengganti peraturan-peraturan perpajakan yang selama ini berlaku, di samping juga untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Berbagai kebijakan tersebut di atas cukup dominan mewarnai kehidupan politis ekonomis Indonesia dalam tahun 1983. Dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan itu, yang menjadi permasalahan adalah bahwa menghadapi berbagai kebijakan pemerintah itu, pendapatan mereka yang berpenghasilan tetap belum memperoleh penyesuaian. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Repelita IV yang sangat penting, yakni era penciptaan kerangka landasan pembangunan nasional, masalah nasib mereka yang berpenghasilan tetap khususnya pegawai negeri kiranya perlu memperoleh perhatian tersendiri, terutama karena pegawai negeri merupakan pelaksana utama usaha-usaha menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional itu. Dalam posisi itu, nasib mereka memerlukan perhatian khusus.

Melihat timbulnya berbagai permasalahan seperti tersebut di atas, mungkin akan timbul pertanyaan mengapa permasalahan-permasalahan itu timbul dan apa sebabnya ia timbul. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapatlah diuraikan seperti di bawah ini.

PENYEBAB TIMBULNYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

Berbagai kesulitan yang dialami oleh berbagai bangsa di dunia, baik karena perang maupun sebagai akibat resesi ekonomi dunia, sudah dapat dipastikan mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal itu adalah karena sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia bukan bangsa dan negara yang tertutup untuk pengaruh dari luar dan juga merupakan negara-bangsa yang tidak menutup diri. Menghadapi berbagai persoalan dunia yang dapat dipastikan mempunyai dampak terhadap kehidupan negara dan bangsa Indonesia itu, yang sangat diperlukan adalah memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Sementara itu, permasalahan politis strategis timbul ke permukaan karena UUD 1945 memuat suatu ketentuan bahwa sekali dalam lima tahun perlu diadakan peninjauan ulang mengenai gerak dan langkah perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Peninjauan itu dimaksudkan untuk menampung berbagai aliran pemikiran maupun keinginan yang timbul dalam masyarakat dalam rangka menentukan haluan negara yang baru. Berkenaan dengan itu, satu hal yang menjadi tolok ukur adalah kepentingan nasional, kontinuitas pelaksanaan pembangunan, tetap dipertahankannya Pancasila dan UUD 1945 serta pelaksanaannya secara murni dan konsekuen.

Permasalahan politis ideologis yang menampakkan dirinya dalam terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan serta sikap di antara kelompok masyarakat Indonesia mengenai penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap kekuatan sosial politik tampaknya disebabkan oleh hal-hal berikut. *Pertama*, adanya perbedaan tafsir mengenai ketentuan GBHN, khususnya ketentuan asas tunggal Pancasila. *Kedua*, masih berkembangnya sikap masyarakat terhadap Pancasila itu sendiri. Di satu pihak Pancasila telah ditetapkan menjadi dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa, tetapi di lain pihak ada sementara pandangan dalam masyarakat yang menolak Pancasila atau ragu-ragu terhadap Pancasila.¹

Sementara itu, munculnya peristiwa-peristiwa yang bersifat politis organisatoris dan politis kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai akibat hal-hal berikut. *Pertama*, ia merupakan konsekuensi logis dari adanya ketentuan GBHN mengenai asas tunggal Pancasila. Dengan adanya ketentuan tersebut, semua organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan diharap dan bahkan harus menyesuaikan diri. *Kedua*, hal itu adalah karena tuntutan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga berbagai organisasi yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di depan kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam tahun 1983 kehidupan sosial politik di Indonesia cukup semarak. Ia diwarnai oleh berbagai kegiatan dan pemikiran-pemikiran yang sangat penting, baik itu dilihat dari aspek politis strategis, politis organisatoris maupun politis kemasyarakatan.

Kedua, berbagai peristiwa dan pemikiran yang berkembang dalam kehidupan perpolitikan itu ternyata diwarnai pula oleh berbagai pro dan kontra.

¹Lihat *Suara Karya*, 29 Agustus 1983.

Oleh sebab itu tugas besar yang menghadang bangsa Indonesia dalam memasuki tahun 1984 adalah menyelesaikan berbagai pro dan kontra yang sempat timbul dalam tahun 1983 tersebut, khususnya mengenai pelaksanaan asas tunggal. Pelaksanaan asas tunggal Pancasila perlu memperoleh prioritas karena seperti dikatakan Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983 yang lalu: "Pemasyarakatan ideologi Pancasila merupakan prasyarat bagi memantapkan pelaksanaan pembangunan selanjutnya sebagai pengamalan Pancasila dan untuk menjamin kelestarian kehidupan dan negara kita."

Ketiga, dari berbagai tanggapan yang muncul, tampak pula adanya sementara kalangan yang menekankan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap berbagai pemikiran dan peristiwa politik yang terjadi, misalnya Tajuk Rencana Harian *Berita Buana*, *Sinar Harapan* dan *Suara Karya*.

Keempat, sesuai dengan perjalanan tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, tahun 1983 merupakan tahun transisi, yakni transisi dari Pelita III ke Pelita IV. Dengan posisi itu, kiranya tidak mengherankan apabila tahun 1983 diliputi oleh berbagai permasalahan yang cukup rumit dan berat. Sesuai dengan posisi itu, kiranya tepat bila dikatakan bahwa tahun 1983 merupakan tahun konsolidasi.

Kelima, persoalan-persoalan tersebut diatas bukan persoalan yang ringan bila dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 1984 karena dalam tahun 1984 bangsa Indonesia akan memasuki era baru dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yakni era pelaksanaan Repelita IV (1 April 1984). Selanjutnya, sebagaimana diketahui, era Pelita Keempat mendatang merupakan era yang amat penting dan menentukan. Hal ini disebabkan karena dalam Pelita Keempat itu akan diusahakan terciptanya kerangka landasan pembangunan nasional yang kuat dalam rangka persiapan tinggal landasnya pembangunan nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengingat bahwa tugas tugas tersebut merupakan tugas yang amat berat, satu hal yang perlu ditekankan ialah penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa.